

BAB II

REZIM KIMBERLEY PROCESS CERTIFICATION SCHEME (KPCS) DAN TATA KELOLA BERLIAN DI ZIMBABWE

Perdagangan komoditas berlian global merupakan salah satu sektor ekonomi yang paling rentan terhadap praktik eksploitasi dan pendanaan konflik bersenjata, terutama di wilayah-wilayah dengan stabilitas politik yang rapuh. Fenomena "berlian konflik" telah lama diakui sebagai ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan internasional, yang memicu lahirnya Kimberley Process Certification Scheme (KPCS) sebagai mekanisme preventif kolektif. Sebagai sebuah rezim internasional, KPCS mengintegrasikan standar teknis sertifikasi dengan komitmen politik negara anggota untuk memastikan bahwa rantai pasok berlian kasar bersih dari unsur kekerasan. Secara normatif, KPCS bersandar pada mandat internasional yang mengharuskan setiap negara produsen menerapkan pengawasan ketat terhadap arus keluar-masuk komoditas tersebut, yang dalam perjalanannya menjadi tolok ukur legitimasi bagi negara-negara seperti Zimbabwe di pasar perhiasan global (Haufler, 2009; Grant & Taylor, 2004).

Sebagai salah satu produsen berlian terbesar di dunia, Zimbabwe memiliki sejarah panjang yang kompleks dalam menyelaraskan kepentingan ekonomi domestiknya dengan tuntutan standar internasional tersebut. Meskipun pemerintah secara formal telah mengadopsi berbagai instrumen hukum dan restrukturisasi kelembagaan, seperti pembentukan Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) dan penerapan National Diamond

Policy (2019), namun realitas di lapangan menunjukkan adanya tantangan struktural yang signifikan (Maguwu, 2022). Kesenjangan antara komitmen administratif dan praktik operasional di wilayah penambangan seringkali menjadi titik krusial yang menempatkan Zimbabwe dalam posisi dilematis di hadapan komunitas internasional. Hal ini diperburuk dengan karakteristik pertambangan aluvial di Marange yang memiliki pengawasan rendah, sehingga seringkali menjadi episentrum bagi praktik non-prosedural yang melibatkan berbagai aktor kunci dalam rezim domestik (Maringira & Masiya, 2016; Kanyepe, 2023).

Untuk memahami secara komprehensif bagaimana interaksi antara standar global dan realitas domestik ini berlangsung, bab ini disusun untuk memberikan gambaran faktual mengenai arsitektur tata kelola berlian di Zimbabwe. Pembahasan dalam bab ini akan mencakup profil serta landasan hukum KPCS, karakteristik geografis dan teknis sektor pertambangan di Zimbabwe, hingga sejarah transformasi tata kelola yang telah terjadi di negara tersebut. Selain itu, bab ini juga akan membedah profil aktor-aktor institusional utama, seperti Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe (MMCZ) dan ZCDC, yang memiliki peran strategis dalam menentukan derajat kepatuhan negara. Dengan memetakan hubungan strategis antara Zimbabwe dan KPCS pada periode 2019–2024, bab ini berfungsi sebagai basis informasi dasar untuk mengevaluasi efektivitas rezim dalam menjangkau dinamika kekuasaan dan praktik pertambangan di tingkat lokal yang seringkali luput dari pantauan administratif formal (Young, 2011; Martin, 2012).

2.1 Profil Kimberley Process Certification Scheme (KPCS)

Kimberley Process Certification Scheme (KPCS) merupakan sebuah rezim internasional berbasis kerja sama *multi-stakeholder* yang melibatkan pemerintah negara produsen dan konsumen berlian, industri berlian global, serta organisasi masyarakat sipil. Inisiatif ini dibentuk sebagai respons terhadap maraknya perdagangan “berlian konflik” (*conflict diamonds* atau *blood diamonds*), yakni berlian kasar yang digunakan oleh kelompok pemberontak bersenjata untuk membiayai konflik internal dan upaya penggulingan pemerintahan yang sah. Melalui sistem sertifikasi internasional terhadap perdagangan berlian kasar, KPCS dirancang untuk meminimalkan risiko pendanaan konflik bersenjata serta mendorong integrasi berlian ke dalam rantai pasok yang terdokumentasi dan dapat ditelusuri. (Grant & Taylor, 2004).

Secara operasional, KPCS mewajibkan setiap negara anggota untuk menerapkan kontrol domestik yang ketat dan memastikan bahwa setiap pengiriman berlian kasar disertai dengan sertifikat asli yang tahan pemalsuan. Keberadaan rezim ini mendapat dukungan formal dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi 55/56 tahun 2000, yang mengakui bahwa perdagangan berlian ilegal merupakan faktor utama pemicu ketidakstabilan keamanan di berbagai wilayah, khususnya di Afrika (General Assembly, 2002). Selain keterlibatan negara, keterlibatan aktif aktor non-negara seperti World Diamond Council juga menjadi pilar penting dalam memastikan kepatuhan industri terhadap standar perdagangan yang bersih, sehingga menciptakan sistem pengawasan yang melintasi batas-batas

kedaulatan tradisional demi menjaga integritas pasar berlian global (Haufler, 2009).

2.1.1 Latar Belakang dan Landasan Hukum

Pembentukan Kimberley Process Certification Scheme (KPCS) tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya kesadaran global pada dekade 1990-an mengenai keterkaitan erat antara eksploitasi sumber daya alam dan pembiayaan konflik bersenjata internal di sejumlah negara Afrika, seperti Sierra Leone, Liberia, dan Angola. Dalam konteks tersebut, perdagangan berlian kasar terbukti menjadi salah satu sumber pendanaan utama bagi kelompok pemberontak yang terlibat dalam perang saudara berkepanjangan, sehingga memicu perhatian serius komunitas internasional terhadap perlunya pengaturan lintas negara (Haufler, 2009). Fenomena ini kemudian dikenal sebagai era "berlian darah," di mana komoditas mewah tersebut justru mengekalkan kekerasan sistemik dan instabilitas politik di wilayah-wilayah kaya sumber daya (Grant & Taylor, 2004).

“Urges all States to support efforts of the diamond producing, processing, exporting and importing countries and the diamond industry to find ways to break the link between conflict diamonds and armed conflict, and encourages other appropriate initiatives to this end, including improved international cooperation on law enforcement;” (General Assembly, 2002)

Sebagai respons normatif, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Resolusi 55/56 pada tahun 2000 yang secara tegas menyerukan pembentukan mekanisme internasional guna memutus

rantai antara perdagangan berlian dan pendanaan konflik bersenjata serta instabilitas politik (General Assembly, 2002). Menindaklanjuti resolusi tersebut, serangkaian perundingan multilateral yang melibatkan negara produsen dan konsumen berlian, pelaku industri, serta organisasi masyarakat sipil dimulai di kota Kimberley, Afrika Selatan. Proses ini mencerminkan konsensus internasional bahwa tata kelola perdagangan berlian memerlukan pendekatan kolektif berbasis rezim internasional.

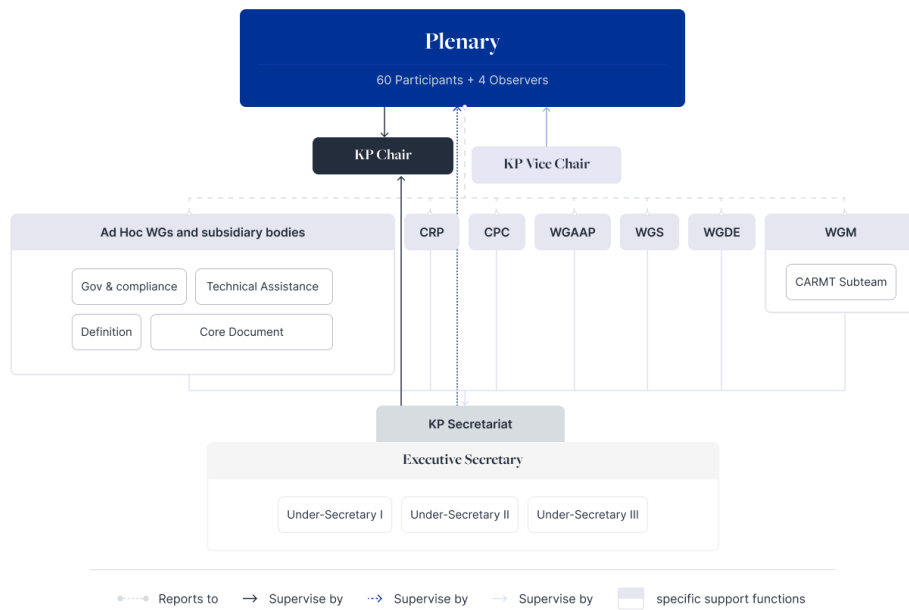
Proses tersebut kemudian menghasilkan Kimberley Process Certification Scheme (KPCS), yang secara resmi diberlakukan secara global pada Januari 2003 sebagai rezim internasional sukarela yang mengatur perdagangan berlian kasar melalui sistem sertifikasi terpadu (Grant & Taylor, 2004). Sejak saat itu, setiap pengiriman berlian kasar lintas batas negara diwajibkan disertai dengan sertifikat KPCS untuk menjamin bahwa komoditas tersebut tidak berasal dari wilayah konflik, sehingga menjaga integritas pasar legal sekaligus melindungi reputasi industri perhiasan global (Haufler, 2009). Secara institusional, mekanisme ini dirancang untuk menciptakan standar bersama dan mempersempit ruang bagi peredaran berlian yang digunakan dalam pendanaan konflik bersenjata.

Hingga saat ini, Kimberley Process Certification Scheme (KPCS) telah berkembang menjadi rezim internasional dengan jangkauan keanggotaan yang sangat luas. Skema ini diikuti oleh 59 peserta yang secara kolektif merepresentasikan sekitar 85 negara, dengan Uni Eropa dihitung sebagai satu entitas keanggotaan tersendiri. Cakupan partisipasi yang hampir universal ini mencakup kurang lebih 99,8% dari total produksi

berlian kasar dunia, sehingga menempatkan KPCS sebagai salah satu rezim tata kelola sumber daya alam paling komprehensif dalam sistem perdagangan global kontemporer (Kimberley Process, 2024). Tingginya tingkat keanggotaan tersebut tidak hanya memperkuat legitimasi normatif KPCS, tetapi juga secara teoretis meningkatkan kapasitas rezim dalam menetapkan standar bersama, mengawasi kepatuhan lintas negara, serta membatasi ruang bagi perdagangan berlian ilegal di luar mekanisme sertifikasi resmi.

Namun demikian, dalam perspektif teori efektivitas rezim, tingginya partisipasi dan cakupan global tidak secara otomatis menjamin efektivitas substantif. Meskipun angka keanggotaan yang masif menunjukkan potensi *problem-solving capacity* yang tinggi, efektivitas rezim tetap bergantung pada sejauh mana mandat normatif dan definisi operasionalnya mampu menjangkau kompleksitas empiris di lapangan (Underdal, 2002). Dengan demikian, keberhasilan institusional dan legitimasi global KPCS perlu dianalisis lebih lanjut untuk menilai apakah kapasitas tersebut benar-benar terkonversi menjadi penyelesaian masalah secara substantif, terutama dalam konteks dinamika kekerasan dan tata kelola berlian di negara produsen seperti Zimbabwe.

2.1.2 Struktur Organisasi dan Mekanisme Kerja



Gambar 2.1 Struktur Visual Tata Kelola KP

Sumber: *Kimberley Process 2025*

Struktur organisasi dan mekanisme kerja KPCS beroperasi melalui sistem tata kelola global yang kompleks dan desentralistik, yang terdiri dari:

- (1) *Plenary* (Rapat Pleno) sebagai otoritas tertinggi yang mengambil keputusan berdasarkan konsensus mutlak, di mana seluruh kebijakan, amandemen *Core Document*, serta status keanggotaan ditetapkan secara kolektif oleh negara peserta;
- (2) *Chairmanship* dan Troika, yaitu sistem kepemimpinan tahunan yang didukung oleh mekanisme Troika (terdiri dari Ketua tahun lalu, Ketua saat ini, dan Wakil Ketua tahun depan) guna menjaga kesinambungan kebijakan rezim, sebuah posisi strategis yang pada

tahun 2023 dijabat oleh Zimbabwe sebagai bentuk pengakuan atas reformasi domestiknya;

- (3) *Administrative Support Mechanism (ASM)* yang berperan sebagai sekretariat fungsional untuk mengelola basis data, komunikasi antaranggota, dan arsip administratif guna memastikan kelancaran operasional rezim;
- (4) *Working Group on Monitoring (WGM)* sebagai instrumen vital dalam penegakan kepatuhan yang menjalankan mekanisme *Peer Review*, termasuk pengiriman *Review Visits* (kunjungan rutin) dan *Review Missions* (misi investigasi jika ditemukan indikasi pelanggaran serius) ke negara produsen untuk memverifikasi implementasi sistem kontrol internal;
- (5) *Working Group on Statistics (WGS)* yang bertugas melakukan rekonsiliasi data ekspor-impor secara triwulan guna mendeteksi anomali statistik yang berpotensi menjadi celah penyelundupan berlian ilegal;
- (6) *Working Group of Diamond Experts (WGDE)* yang menyediakan keahlian teknis dalam identifikasi karakteristik fisik berlian serta standarisasi sertifikat KP agar tidak mudah dipalsukan;
- (7) *Working Group on Artisanal and Alluvial Production (WGAAP)* yang secara spesifik menangani tantangan pada sektor pertambangan rakyat yang rentan terhadap konflik, sebuah aspek yang sangat relevan dengan konteks wilayah Marange di Zimbabwe; serta

(8) *Observers*, yakni keterlibatan aktif entitas non-negara seperti World Diamond Council dan Civil Society Coalition yang berfungsi sebagai "anjing penjaga" (*watchdog*) independen yang memberikan laporan penyeimbang atas klaim kepatuhan yang diajukan oleh pemerintah negara peserta (Kimberley Process, 2024).

2.2 Karakteristik Sektor Pertambangan Berlian di Zimbabwe

Sektor pertambangan berlian di Zimbabwe memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari negara produsen lain di kawasan Afrika Sub-Sahara. Karakteristik utama wilayah ini didominasi oleh keberadaan endapan berlian aluvial yang sangat melimpah, khususnya di wilayah ladang berlian Marange (Chiadzwa) di distrik Mutare (Moyo et al., 2024). Berbeda dengan berlian kimberlite yang memerlukan penambangan bawah tanah yang dalam dan modal besar, berlian aluvial di Marange terletak dekat dengan permukaan tanah sehingga secara teknis lebih mudah diekstraksi. Namun, kemudahan akses tersebut sekaligus meningkatkan kerentanan terhadap aktivitas penambangan ilegal, eksploitasi tidak terkontrol, serta praktik penyelundupan yang sulit diawasi secara menyeluruh (Saunders & Nyamunda, 2016). Kondisi geologis ini menciptakan tantangan struktural dalam tata kelola, karena intensitas aktivitas ekstraksi yang tinggi tidak selalu diiringi dengan kapasitas pengawasan yang memadai.

Pemerintah Zimbabwe memosisikan sektor ini sebagai pilar utama dalam strategi pembangunan ekonomi nasional. Hal ini tertuang dalam

National Development Strategy 1 (NDS1) 2021–2025, di mana pemerintah menargetkan sektor pertambangan secara keseluruhan mampu menyumbang pendapatan sebesar 12 miliar USD pada tahun 2025. Dalam target tersebut, sub-sektor berlian diproyeksikan memberikan kontribusi signifikan sebesar 1 miliar USD per tahun (Government of Zimbabwe, 2020). Strategi ini mencerminkan upaya sentralisasi kontrol negara melalui Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) guna memastikan bahwa hasil sumber daya alam dapat dikonversi menjadi modal pembangunan jangka menengah dan panjang.

Namun demikian, orientasi ekonomi yang kuat terhadap peningkatan produksi dan pendapatan negara berpotensi menciptakan dilema kebijakan pada level implementasi. Tekanan untuk memenuhi target fiskal dapat berbenturan dengan kewajiban untuk menerapkan standar transparansi dan akuntabilitas yang ketat sebagaimana diatur dalam kerangka KPCS. Dalam konteks ini, ambisi pembangunan ekonomi tidak hanya menjadi agenda nasional, tetapi juga dapat memperbesar asimetri kepentingan antara elite domestik dan norma internasional, sehingga memperumit upaya pengawasan dan pengendalian praktik eksploitatif (Moyo et al., 2024). Kondisi tersebut menjadi faktor penting dalam memahami kompleksitas *problem malignancy* di sektor berlian Zimbabwe serta tantangan dalam mengonversi regulasi formal menjadi perubahan substantif di lapangan.

Tabel 2.1 Data Statistik Volume dan Nilai Produksi di Zimbabwe

Tahun	Volume Produksi (Karat)	Nilai Produksi (USD)
-------	-------------------------	----------------------

2019	2,108,261.08	\$141.448.511,00
2020	2,670,457.62	\$152.597.484,34
2021	4,225,181.15	\$669.966.440,12
2022	4,461,450.15	\$423.612.395,43
2023	4,913,592.75	\$303.160.955,38
2024	5,293,329.41	\$163.763.097,81

Sumber: Kimberley Process Global Summary 2019-2024,

Diolah oleh penulis (2026)

Tabel 2.1 menunjukkan tren peningkatan volume produksi berlian Zimbabwe secara konsisten dari tahun 2019 hingga 2024, dengan kenaikan dari 2,1 juta karat pada 2019 menjadi lebih dari 5,29 juta karat pada 2024 (Kimberley Process, 2019; Kimberley Process, 2024). Namun, tren nilai produksi tidak menunjukkan pola yang linear dan justru mengalami fluktuasi signifikan. Setelah mencapai puncaknya pada tahun 2021 sebesar 669 juta USD, nilai produksi mengalami penurunan bertahap hingga hanya mencapai sekitar 163 juta USD pada tahun 2024 (Kimberley Process, 2024). Pola ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara peningkatan kuantitas produksi dan penurunan nilai ekonomi yang dihasilkan.

Penurunan nilai yang kontras dengan kenaikan volume pada tahun 2024 dapat mengindikasikan beberapa kemungkinan, seperti pergeseran kualitas berlian yang ditambang, perubahan harga pasar berlian kasar secara global, atau adanya tekanan struktural dalam rantai distribusi yang memengaruhi nilai jual komoditas tersebut. Dalam konteks analisis

efektivitas rezim, fenomena ini menjadi poin penting karena peningkatan volume produksi tidak secara otomatis mencerminkan peningkatan kesejahteraan ekonomi atau perbaikan tata kelola. Sebaliknya, ketidaksesuaian antara volume dan nilai dapat mengindikasikan adanya inefisiensi dalam rantai pasok yang telah tersertifikasi, atau keterbatasan kemampuan rezim dalam memastikan optimalisasi nilai tambah komoditas nasional (Kimberley Process, 2024).

Selain itu, fluktuasi tajam dalam nilai produksi juga memunculkan pertanyaan mengenai transparansi pelaporan dan konsistensi mekanisme pengawasan, yang merupakan bagian integral dari indikator kepatuhan dalam kerangka efektivitas rezim internasional (Underdal, 2002). Dengan demikian, data statistik ini tidak hanya relevan sebagai gambaran kinerja ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen analitis untuk menilai apakah keberhasilan administratif dalam sistem sertifikasi benar-benar berkontribusi terhadap dampak substantif pada level ekonomi dan tata kelola.

2.3 Sejarah dan Dinamika Tata Kelola Berlian di Zimbabwe

Tata kelola sektor berlian di Zimbabwe menunjukkan dinamika yang tajam antara periode krisis serius dan agenda reformasi kebijakan yang bertujuan memulihkan kredibilitas internasional. Krisis paling signifikan terjadi pada tahun 2008 melalui operasi militer *Operation Hakudzokwi* di kawasan Marange; meskipun dimaksudkan untuk menertibkan aktivitas penambangan ilegal, operasi tersebut justru memicu tuduhan pelanggaran hak asasi manusia berat oleh aparat keamanan (Human Rights Watch, 2009).

Dinamika ini menunjukkan bagaimana kontrol atas sumber daya berlian seringkali berkaitan dengan upaya mempertahankan kekuasaan politik, di mana pihak yang menguasai akses terhadap berlian dianggap memegang kendali atas struktur kekuasaan negara (Munier, 2016) .

Menyusul peristiwa tersebut, KPCS menanggukkan status kepatuhan Zimbabwe hingga tahun 2011. Namun, proses ini juga memicu perdebatan mengenai politisasi di dalam tubuh KPCS sendiri, di mana mekanisme sertifikasi dianggap belum mampu sepenuhnya menjangkau kekerasan yang terlembagakan oleh negara (Munier, 2016). Sebagai respons, pemerintah menerbitkan Zimbabwe National Diamond Policy (ZNDP) pada tahun 2019 guna memperkuat sentralisasi kontrol melalui entitas seperti ZCDC dan Alrosa (Zhuwarara, 2017). Langkah ini secara teoretis merupakan *output* kebijakan yang dirancang untuk menjawab tuntutan transparansi rezim internasional sekaligus mengamankan kepentingan ekonomi domestik (Underdal, 2002).

2.4 Profil Aktor-Aktor Kunci dalam Rezim Domestik

Efektivitas implementasi KPCS di Zimbabwe sangat bergantung pada koordinasi strategis dan sinergi operasional antara lembaga regulator negara dan operator pertambangan utama. Dalam hal ini, Kementerian Pertambangan dan Pengembangan Pertambangan bersama unit otoritas KPCS lokal harus mampu memastikan bahwa entitas seperti Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) dan mitra swasta lainnya

menjalankan protokol pembersihan, penyortiran, serta pengemasan berlian sesuai dengan standar keamanan rezim internasional (James J. Barry, 2024).

Namun, tantangan dalam koordinasi ini sering kali muncul akibat adanya tumpang tindih kepentingan antara target pencapaian pendapatan nasional dengan kewajiban penegakan transparansi yang ketat. Kualitas sinergi ini menjadi penentu apakah sertifikasi KPCS yang dikeluarkan oleh pemerintah benar-benar merefleksikan rantai pasok yang bersih, atau hanya sekadar prosedur administratif yang menutupi inefisiensi di level operasional (Underdal, 2002). Kegagalan dalam menjamin koherensi antara regulator dan operator inilah yang berpotensi menghambat pencapaian *impact* positif rezim terhadap reputasi industri berlian Zimbabwe di pasar global (Grant, 2012).

2.4.1 Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe (MMCZ)

Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe (MMCZ) merupakan institusi negara yang memegang mandat hukum paling strategis dalam tata kelola perdagangan mineral nasional berdasarkan MMCZ Act [Chapter 21:04]. Dalam Part IV, Section 20 (Functions of Corporation), disebutkan:

"(1) The functions of the Corporation shall be The functions of the Corporation shall be—(a) to act as the sole marketing and selling agent for all minerals; (b) to investigate or cause to be investigated marketing conditions, whether inside or outside Zimbabwe, for minerals in general or for any particular mineral; (c) to purchase and acquire any minerals for its own account and to sell or dispose of

such minerals; (d) to encourage the local beneficiation and utilization of any minerals; (e) to advise the Minister on all matters connected with the marketing of minerals; (f) to do all things which by this Act or any other enactment are required to be done by the Corporation."

Dalam kerangka Kimberley Process Certification Scheme (KPCS), MMCZ berperan sebagai *National Authority* yang berfungsi sebagai satu-satunya gerbang resmi bagi ekspor berlian dari Zimbabwe. Serta pada Section 42 (Control of Export of Minerals):

"No person other than the Corporation shall export any mineral from Zimbabwe except in terms of a permit issued by the Corporation."

Melalui kewenangan monopoli pemasaran, MMCZ memusatkan seluruh transaksi penjualan berlian kasar di bawah satu mekanisme terkontrol guna meniadakan perantara ilegal dan mempersempit ruang bagi praktik penyelundupan (Government of Zimbabwe, 2020).

Lembaga ini memiliki otoritas valuasi teknis melalui penugasan penilai berlian pemerintah yang memastikan bahwa setiap produksi berlian khususnya dari wilayah Marange dinilai sesuai dengan harga pasar internasional, sehingga mencegah manipulasi harga dan menjamin penerimaan negara yang akurat. MMCZ juga bertanggung jawab melakukan verifikasi menyeluruh atas rantai kepemilikan sebelum menerbitkan sertifikat Kimberley Process sebagai bukti bahwa berlian yang diekspor telah memenuhi standar kepatuhan internasional dan bebas dari unsur

konflik (Government of Zimbabwe, 2020). Melalui mekanisme sentralisasi ini, MMCZ menjadi instrumen kunci pemerintah dalam menegaskan transparansi administratif sekaligus melindungi kedaulatan ekonomi sumber daya mineral nasional di bawah pengawasan rezim global (Underdal, 2002).

2.4.2 Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC)

Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) merupakan perusahaan milik negara yang dibentuk pada tahun 2016 sebagai bagian dari kebijakan strategis pemerintah Zimbabwe untuk mengkonsolidasikan seluruh pemegang konsesi pertambangan berlian di wilayah Marange ke dalam satu entitas terpusat. Dalam kerangka Kimberley Process Certification Scheme (KPCS), perusahaan ini berperan sebagai aktor domestik utama yang bertanggung jawab atas seluruh tahapan operasional pertambangan berlian, mulai dari proses ekstraksi, pemilahan, hingga pengamanan cadangan berlian strategis nasional (Ministry of Finance and Economic Development (Government of Zimbabwe, 2020).

Pembentukan perusahaan konsolidasi ini memungkinkan pemerintah untuk memusatkan kontrol wilayah dan keamanan di bawah satu komando operasional, sehingga secara signifikan menurunkan risiko penambangan ilegal serta mengurangi fragmentasi aktor keamanan yang sebelumnya memicu sorotan internasional terkait pelanggaran hak asasi manusia. Secara teknis, integrasi sistem logistik dan operasional di bawah ZCDC juga ditujukan untuk meningkatkan performa manajemen rantai pasok agar

sesuai dengan standar transparansi internasional yang ditetapkan oleh rezim global (Kanyepe, 2023).

Sebagai respons terhadap tuntutan transparansi dan pengawasan internasional, Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) mengintegrasikan sistem pengamanan digital yang komprehensif dalam seluruh rantai operasionalnya. Sistem ini mencakup pemasangan kamera pengawas berbasis kecerdasan buatan (AI) di fasilitas pemilahan berlian, penerapan sistem pemindaian biometrik untuk mengontrol akses personel, serta penggunaan perangkat pelacak berbasis GPS pada kendaraan pengangkut hasil tambang (Kanyepe, 2023).

Penerapan teknologi ini memungkinkan pemantauan secara waktu nyata (*real-time*) terhadap pergerakan berlian sejak keluar dari area tambang hingga disimpan di fasilitas penyimpanan aman sebelum diserahkan kepada MMCZ. Meskipun demikian, lembaga pemantau internasional mencatat bahwa efektivitas teknologi ini sangat bergantung pada integritas aktor yang mengoperasikannya, mengingat sejarah panjang kontrol militer yang masih membayangi tata kelola di wilayah Marange (*An inside Job*, 2017a). Infrastruktur digital ini merupakan bagian dari upaya Zimbabwe dalam menyesuaikan praktik domestik dengan standar kepatuhan teknis KPCS. (Maguwu, 2022).

Selain itu, perusahaan ini menerapkan mekanisme ketertelusuran yang ketat melalui prinsip rantai penguasaan (*chain of custody*) yang terdokumentasi secara digital. Setiap volume produksi berlian dicatat

berdasarkan lokasi dan waktu ekstraksi, sehingga asal-usul setiap berlian dapat diverifikasi secara sistematis (Kanyepe, 2023). Mekanisme ini dirancang untuk menutup peluang masuknya berlian dari sumber ilegal ke dalam jalur produksi resmi, sebuah langkah yang krusial untuk memperbaiki citra berlian Zimbabwe pasca-krisis Marange.

Melalui penguasaan wilayah yang terpusat dan pemanfaatan teknologi pengamanan, Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) berperan sebagai instrumen domestik dalam implementasi standar pengawasan KPCS. Secara administratif, sistem ini menunjukkan adanya penguatan mekanisme pengawasan, meskipun keberlanjutan implementasinya masih bergantung pada transparansi audit ekspor yang dilakukan bersama otoritas pemasaran nasional guna memastikan tidak terjadi ketidakcocokan data di level hilir (Merket & Jonatan Weenink, 2023).

2.5 Hubungan Strategis Zimbabwe dan KPCS (2019-2024)

Periode 2019–2024 menunjukkan perubahan dinamika hubungan Zimbabwe dengan KPCS, khususnya dalam konteks partisipasi aktif di forum rezim. Setelah melalui masa sanksi dan pengawasan ketat, relasi antara pemerintah Zimbabwe dan Kimberley Process menunjukkan peningkatan intensitas interaksi, terutama melalui partisipasi dalam mekanisme evaluasi dan forum pengambilan keputusan.. Dinamika tersebut tercermin melalui dua momentum kunci.

Pertama, validasi internasional melalui mekanisme Review Visit (2022). Pada Mei 2022, tim peninjau KPCS yang terdiri dari unsur pemerintah, industri, dan organisasi masyarakat sipil melakukan evaluasi lapangan secara komprehensif di wilayah pertambangan Marange serta fasilitas administratif di Harare. Hasil peninjauan menyatakan bahwa sistem sertifikasi dan kontrol internal Zimbabwe telah memenuhi seluruh *Minimum Requirements* rezim (Kimberley Process, 2022). Pengakuan ini berfungsi sebagai legitimasi internasional yang menegaskan efektivitas implementasi Zimbabwe National Diamond Policy 2019 dalam meningkatkan kepatuhan operasional terhadap standar global (Mkodzongi, 2023). Keberhasilan ini secara teoretis menandai transisi Zimbabwe dari aktor yang menyimpang menjadi aktor yang patuh (*compliant actor*) dalam struktur rezim internasional (Underdal, 2002).

Kedua, pengakuan kepemimpinan global melalui penunjukan Zimbabwe sebagai *Chair* Kimberley Process (2023). Penunjukan ini memiliki makna simbolik dan substantif yang signifikan, mengingat Zimbabwe sebelumnya diposisikan sebagai aktor bermasalah dalam rezim. Kepercayaan untuk memimpin agenda global menunjukkan keberhasilan proses sosialisasi norma dan reintegrasi institusional Zimbabwe dalam rezim internasional. Sidang Pleno tingkat tinggi di Victoria Falls pada November 2023 menjadi forum strategis bagi Zimbabwe untuk memimpin diskursus mengenai redefinisi konsep *conflict diamonds* serta penguatan mekanisme transparansi global (*KP Chairs Strategic Meeting, 12-13 January 2023*, 2023).

Secara analitis, perkembangan ini menunjukkan bahwa posisi Zimbabwe telah bergeser dari sekadar objek kepatuhan (*compliance*) menjadi aktor normatif yang turut berkontribusi dalam pembentukan aturan rezim (*rule-making*) (Mkodzongi, 2023). Dengan demikian, efektivitas Kimberley Process Certification Scheme pada periode ini lebih tepat dianalisis melalui kerangka kerja sama institusional dan penguatan kapasitas, bukan semata-mata melalui instrumen tekanan dan sanksi (Underdal, 2002). Perubahan peran ini mengukuhkan bahwa kapasitas penyelesaian masalah (*problem-solving capacity*) Zimbabwe telah diakui oleh komunitas internasional secara kolektif.